BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Kontribusi dari sektor perpajakan sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, proyek-proyek pembangunan, dan penyediaan pendidikan. Namun, tantangan signifikan yang sering dihadapi oleh banyak negara adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Beberapa warga negara tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya atau bahkan berusaha menghindari kewajiban pajak mereka sama sekali. Akibat dari rendahnya kepatuhan pajak ini sangat merugikan pemerintah. Pendapatan negara berkurang secara signifikan, yang pada gilirannya menghambat kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik dan membangun infrastruktur yang diperlukan. Tanpa pendapatan yang memadai dari pajak, pemerintah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Menurut laporan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak nasional dari Januari hingga September 2023 mencapai Rp1.387,7 triliun, atau sekitar 80,78% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.718 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga Indonesia yang belum

memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak, efektivitas sistem administrasi pajak, insentif atau sanksi yang diterapkan, serta persepsi masyarakat terhadap transparansi dan penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Dengan memahami faktor-faktor ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Selain itu, Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem administrasi pajak untuk mempermudah proses pembayaran dan memastikan transparansi dalam penggunaan dana pajak, sehingga masyarakat merasa lebih yakin dan termotivasi untuk membayar pajak dengan benar.

Dalam konteks optimalisasi penerimaan pajak, kepercayaan terhadap lembaga pajak telah diidentifikasi sebagai faktor krusial yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Pauji, 2020), persepsi wajib pajak terhadap kepercayaan mereka pada pemerintah dan sistem hukum memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Namun, penelitian oleh (Kristianti & Subarjo, 2021) dan (Purnamasari et al., 2018) Menemukan bahwa kepercayaan tidak selalu berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh (Ibrahim et al., 2020),(Safitri, 2017),(Martinez-Vazquez et al., 2021), menunjukkan bahwa ketika masyarakat memiliki kepercayaan pada tugas dan peran petugas pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta adanya insentif pajak yang jelas, tingkat kepatuhan pajak cenderung meningkat.

Kepercayaan terhadap lembaga pajak tidak hanya mempengaruhi kepatuhan pajak secara langsung, tetapi juga bertindak sebagai faktor moderasi yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika masyarakat yakin bahwa lembaga pajak bekerja dengan integritas dan transparansi, serta bahwa dana pajak dikelola dengan baik untuk kepentingan umum, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Penting untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor, termasuk persepsi wajib pajak terhadap integritas petugas pajak, efektivitas administrasi pajak, dan adanya insentif yang adil, dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan, pada akhirnya, kepatuhan pajak. Pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan ini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Strategi edukasi dan kampanye kesadaran publik juga perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan bagaimana kontribusi mereka dapat berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu strategi tersebut adalah pemberian insentif pajak. Insentif pajak bertujuan untuk mendorong perilaku positif di kalangan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Dengan memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak, kredit pajak, atau penghapusan penalti, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Insentif pajak oleh (P. Wajib et al., 2021) Insentif pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat dan bisnis menabung dengan menurunkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Insentif

pajak atas kepatuhan wajib pajak adalah berbagai bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan yang memenuhi persyaratan untuk membayar pajak, Peraturan perpajakan yang berlaku akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam pembayaran pajak yang merupakan tujuan utama dari jenis insentif ini. Pemerintah biasanya memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang patuh dalam bentuk keringanan pajak, kredit, atau penalti. Mereka berharap bahwa pemberian insentif ini akan meningkatkan kepatuhan sistem pajak secara keseluruhan, meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, penerapan insentif pajak bukan tanpa tantangan penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak (Dewi et al., 2020), (R. N. Putri et al., 2022), (K. Wajib & Selama, 2021), (Damayanti, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek, mereka juga bisa menimbulkan efek negatif. Misalnya, wajib pajak mungkin hanya mematuhi peraturan pajak ketika insentif diberikan, dan kembali tidak patuh ketika insentif tersebut dicabut. Selain itu, insentif pajak dapat menimbulkan ketidakadilan di antara wajib pajak, di mana mereka yang sudah patuh tanpa insentif merasa tidak dihargai.

Sosialisasi pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021), Sosialisasi pajak dilaksanakan untuk memberikan informasi yang akurat kepada wajib pajak tentang pajak sehingga mereka tahu betapa pentingnya membayar pajak. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan lebih banyak pembayar pajak yang patuh. Tapi itu hal yang berbeda yang ditunjukkan oleh penelitian (Ainul & Susanti,

2021), (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019), (Mahadianto & Astuti, 2017) bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh sosialisasi. Dengan memahami pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial suatu negara, sosialisasi perpajakan menjadi alat dalam membentuk perilaku wajib pajak dan memastikan sistem perpajakan beroperasi secara efektif dan efisien.

2019 Belajar oleh (Haribowo, 2022), (Iswati Tri; Soegiharto, H Eddy; Ruliana, 2008) menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah denda atau sanksi yang dikenakan kepada orang atau perusahaan karena melanggar undang-undang perpajakan. Contoh sanksi adalah tindakan hukum seperti denda, bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, dan bahkan tuntutan pidana. Belajar (Indrasari et al., 2020), (Sumba Wirawan et al., 2024), (Indrayani et al., 2022) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi atau pencegah pajak. Sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan memastikan bahwa semua pihak, baik badan hukum maupun perorangan, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak?
6. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak?
7. Apakah terdapat kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah terdapat kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak memoderasi hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah terdapat kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membutikan secara empiris Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Membutikan secara empiris Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Membutikan secara empiris Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Membutikan secara empiris Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Lembaga Pajak.
5. Membutikan secara empiris Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Lembaga Pajak.
6. Membutikan secara empiris Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Lembaga Pajak.
7. Membutikan secara empiris Peran Moderasi Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Lembaga Pajak dalam Hubungan antara Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.
8. Membutikan secara empiris Peran Moderasi Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Lembaga Pajak dalam Hubungan antara Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.
9. Membutikan secara empiris Peran Moderasi Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Lembaga Pajak dalam Hubungan antara Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Pemerintah dan Otoritas Pajak: Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang strategi sosialisasi, pemberian insentif, serta penerapan sanksi yang lebih optimal, dengan memperhatikan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan.
2. Untuk Akademisi dan Peneliti: Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin memperdalam kajian terkait kepatuhan wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan peran sosialisasi, insentif, sanksi, dan faktor kepercayaan.
3. Untuk Masyarakat Wajib Pajak: Membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya sosialisasi perpajakan, manfaat insentif yang diberikan, serta dampak dari sanksi perpajakan.
4. Untuk Pembuat Kebijakan: Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pajak yang dapat memperkuat kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak nasional secara keseluruhan.

1.5 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Andianty & Umaimah, 2023) dengan judul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi". Pada penelitian ini terdapat perbedaan beberapa variabel, yakni pada variabel pengaruh sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan kepada lembaga pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian sebelumnya menjadikan sosialisasi sebagai

variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan saat ini, kepercayaan kepada lembaga pajak digunakan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya hasil yang berbeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini menyebabkan adanya research gap. Dalam penelitian sebelumnya, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor utama yang diuji, sedangkan penelitian ini memperluas cakupan dengan memperkenalkan insentif pajak dan melihat peran kepercayaan kepada lembaga pajak sebagai variabel moderasi. Hal ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana berbagai faktor perpajakan berinteraksi dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta persepsi mereka terhadap lembaga perpajakan.